

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KERAMAT BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Moch. Hidayat¹, Arpandi², Saidah Hasbiyah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: Mochmmd.hidayat@gmail.com

ABSTRAK

Pasar Keramat Barabai merupakan pusat perekonomian vital di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area terlarang seperti trotoar dan bahu jalan mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan. Pemerintah telah mengatur larangan ini dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024, namun implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya personel, infrastruktur, dan keterbatasan kemampuan petugas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 11 informan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP cukup optimal dalam hal tanggung jawab, ketepatan waktu, dan pemanfaatan anggaran. Namun, kendala masih terdapat pada infrastruktur, jumlah, dan keterampilan petugas. Disarankan agar peningkatan anggaran, peningkatan kapasitas petugas, dan keterlibatan aktif pedagang kaki lima dalam menjaga ketertiban pasar dilaksanakan.

Kata Kunci : Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban

ABSTRACT

Barabai Sacred Market is a vital economic center in Hulu Sungai Tengah Regency. However, the presence of street vendors (PKL) operating in prohibited areas such as sidewalks and road shoulders disrupts public transportation and environmental comfort. The government has regulated this prohibition in Regional Regulation Number 6 of 2024, but its implementation in the field faces various obstacles, such as a lack of personnel, infrastructure, and limited officer capabilities. This study aims to analyze the performance of the Public Order Agency (Satpol PP) in controlling street vendors at Barabai Sacred Market. The method used is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of 11 informants selected using purposive sampling. The results show that Satpol PP's performance is quite optimal in terms of responsibility, timeliness, and budget utilization. However, obstacles still exist in infrastructure, the number, and skills of officers. It is recommended that budget increases, officer capacity building, and active involvement of street vendors in maintaining market transactions be implemented.

Keywords: Performance, Civil Service Police Unit, Order

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu elemen vital dalam sektor informal yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjual, tetapi sering kali juga berperan sebagai produsen, menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. PKL biasanya menjajakan berbagai jenis produk, mulai dari makanan dan minuman hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari, dengan harga yang terjangkau.

Salah satu ciri khas dari PKL adalah fleksibilitas dalam operasional mereka. Beberapa pedagang memilih untuk beroperasi di lokasi tetap, seperti di pasar tradisional atau di pinggir jalan yang ramai, sementara yang lain lebih memilih untuk berpindah-pindah, menggunakan pikulan atau gerobak.

Metode ini memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan beradaptasi dengan permintaan pasar yang berubah-ubah. Misalnya, pada waktu-waktu tertentu, seperti saat jam makan siang atau saat acara khusus, mereka dapat memindahkan lokasi jualan mereka untuk menarik lebih banyak pembeli.

Keberadaan PKL juga memberikan dampak sosial yang positif. Mereka sering kali menjadi bagian dari komunitas lokal, menciptakan interaksi sosial yang kuat antara penjual dan pembeli. Selain itu, PKL juga berkontribusi pada pelestarian budaya kuliner lokal, dengan menawarkan makanan tradisional yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pelestarian identitas budaya masyarakat. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, PKL juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah legalitas dan regulasi. Banyak PKL yang beroperasi tanpa izin resmi, yang dapat menyebabkan konflik dengan pihak berwenang. Selain itu, mereka juga sering kali terancam oleh kebijakan penertiban yang dapat mengakibatkan penggusuran lokasi jualan mereka. Tantangan lainnya termasuk persaingan yang ketat, terutama dengan toko-toko modern dan supermarket yang menawarkan produk serupa dengan fasilitas yang lebih baik.

Untuk mendukung keberlanjutan PKL, diperlukan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang mendukung, seperti penyediaan lokasi yang aman dan nyaman untuk berjualan, serta pelatihan keterampilan bagi para pedagang, dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan lebih memilih untuk berbelanja di PKL, sehingga membantu meningkatkan pendapatan mereka.

Secara keseluruhan, Pedagang Kaki Lima adalah bagian integral dari ekosistem ekonomi yang lebih luas. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat terus berkontribusi pada perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkaya kehidupan sosial serta budaya masyarakat. Keberadaan PKL telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan harga terjangkau sebagai solusi ekonomi. Namun, meskipun memberikan manfaat, kehadiran PKL juga menimbulkan masalah baru, terutama ketika mereka berjualan di lokasi yang tidak seharusnya, seperti trotoar atau bahu jalan. Hal ini membuat aktivitas mereka dianggap ilegal dan mengganggu kepentingan umum.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masalah PKL yang berjualan tanpa izin resmi di lokasi Pasar Keramat Barabai telah mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sebagai langkah penertiban. Pasar Keramat Barabai, yang terletak di ibu kota kabupaten, merupakan pusat perdagangan regional dengan luas sekitar 76.475 meter persegi dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pengamatan awal (observasi) yang kemudian telah ditemukan fenomena - fenomena atau permasalahan yang ditemui yaitu meliputi keterbatasan jumlah dan kemampuan personel, ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan jadwal yang telah ditetapkan, kurangnya sarana, prasarana, dan dana operasional, serta lemahnya tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan penertiban. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kinerja Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya di Pasar Keramat Barabai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Fazriannor (2020) di Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam pengendalian PKL masih kurang optimal. Meskipun indikator efisiensi dan efektivitas sudah baik, masih ada kendala dalam hal kesesuaian rencana, pelaksanaan tugas, pencapaian hasil, serta kerja sama antarpetugas. Faktor penghambat utama adalah kurangnya anggaran, pemahaman yang minim tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta

kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Temuan-temuan ini mencerminkan bahwa masalah penertiban PKL tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis di lapangan, tetapi juga menyentuh aspek perencanaan, sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Sedangkan dalam penelitian Rahmi Andini Syamsuddin (2020) yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kabupaten Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, bertujuan untuk menganalisis kinerja SatpolPP Kabupaten Serpong dalam penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meliputi efektivitas, daya tanggap, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kabupaten Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong belum maksimal hal ini dapat dilihat pada indikator efektivitas masih kurang, sedangkan indikator tanggung jawab dan daya tanggap sudah baik, dengan SatpolPP melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima dan menerima pengaduan serta saran dengan baik. Indikator akuntabilitas juga menunjukkan hasil yang baik, menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah oleh SatpolPP Kabupaten Serpong telah dilaksanakan dengan kualitas yang baik, tepat waktu, dan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan informan dilakukan secara *purposive sampling* terhadap 11 orang yang dianggap memiliki pengetahuan relevan terkait fenomena yang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada indikator kinerja menurut Robbins (dalam Bintoro dan Daryanto 2017), yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, analisis data kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck* sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2018)

METODE

Metode penelitian ini yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat Kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan gejala gejala lainnya dalam masyarakat. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan informan yang dilibatkan berjumlah sebelas orang dengan menggunakan *proposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*.

PEMBAHASAN

A. KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KERAMAT BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Penelitian ini akan berfokus pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kinerja ini akan diuraikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robbins (dalam Bintoro dan Daryanto, 2017:107).

1. Kualitas

Kualitas merupakan gambaran dari tingkat keunggulan suatu hasil kerja yang didasarkan pada persepsi nilai dan penerapan kompetensi oleh para pekerja yang terlibat.

a. Kemampuan

Kemampuan merupakan cermin potensi yang dapat dimanfaatkan karyawan untuk mencapai standar kualitas tertentu dalam hasil kerja mereka, sehingga menjadi faktor penting dalam menilai kualitas secara menyeluruhan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kemampuan komunikasi petugas secara persuasif, tidak adanya forum komunikasi resmi antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima, serta ketimpangan kemampuan antar personil akibat minimnya pelatihan dan pengalaman, dan masih dominannya personil non-ASN. Misalnya, pada saat penertiban, petugas seringkali hanya meminta pedagang untuk membongkar lapaknya tanpa memberikan solusi atau arahan terkait lokasi berjualan yang diizinkan, sehingga menimbulkan kebingungan dan resistensi dari pedagang. Selain itu, masih banyak pedagang yang berjualan di area terlarang akibat kurangnya tindak lanjut dan ketegasan akibat terbatasnya personil yang berpengalaman. Kemampuan ini juga mencerminkan potensi yang dapat dioptimalkan oleh pekerja untuk mencapai kualitas tertentu dalam hasil kerja, sehingga menjadi unsur penting dalam mengukur indikator kualitas secara keseluruhan.

b. Keterampilan

Keterampilan dapat didefinisikan sebagai kemampuan praktis atau teknis yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan yang dibutuhkan untuk menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Keramat masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas dalam hal komunikasi dan negosiasi, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi tersebut.

2. Kuantitas

Kuantitas merupakan parameter penting dalam menilai produktivitas karena memberikan gambaran konkret tentang kapasitas dan efisiensi kerja. Pengukuran ini membantu organisasi memantau sejauh mana pekerja memenuhi target volume kerja yang telah ditetapkan.

a. Jumlah personel yang terlibat

Jumlah personel yang terlibat merupakan jumlah total individu atau sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan, proyek, organisasi, ataupun acara tertentu. Angka ini mencerminkan jumlah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tanggung jawab yang dibutuhkan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa jumlah personel yang terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingkat pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Jumlah unit kerja

Jumlah unit kerja merupakan elemen struktural penting yang mengelompokkan kegiatan berdasarkan fungsi, tujuan, atau keahlian bersama. Pengelompokan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan memfasilitasi koordinasi serta pengendalian operasional. Setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, yang biasanya diuraikan dalam dokumen formal seperti bagan organisasi dan deskripsi pekerjaan. Hal ini membantu individu dalam

unit kerja memahami ruang lingkup pekerjaan mereka dan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi.

Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa jumlah unit kerja dalam melaksanakan tugasnya menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Keramat masih kurang optimal. Walaupun terdapat struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas antar unit, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan, seperti ketidakseimbangan beban kerja antar departemen, kurangnya koordinasi baik di dalam maupun di luar organisasi, serta keterbatasan jumlah dan pengalaman personel. Faktor-faktor ini mengakibatkan pelaksanaan tugas di lapangan tidak berjalan secara baik.

3. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pekerja untuk menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kedisiplinan dan komitmen pekerja terhadap jadwal kerja.

a. Disiplin pelaksanaan tugas

Disiplin Pelaksanaan tugas adalah cerminan konsistensi dan kepatuhan pekerja dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup kemampuan pekerja untuk mematuhi jadwal, mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa penundaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, serta dokumentasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan dalam melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai masih optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas yang tetap dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai prosedur, meskipun terdapat keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung. Petugas melakukan patroli rutin dan dadakan sesuai dengan arahan yang diberikan, serta menunjukkan kesiapsiagaan dalam menanggapi laporan dari masyarakat. Penilaian dari masyarakat dan pedagang juga menunjukkan adanya peningkatan kedisiplinan, dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai lebih tertib dan teratur dari sebelumnya, meskipun masih terdapat aspek konsistensi dalam pelaksanaannya yang perlu ditingkatkan.

b. Penggunaan waktu dalam bekerja

Penggunaan waktu dalam bekerja merupakan seseorang yang bagaimana mengatur dan memanfaatkan jam kerja secara efisien. Individu yang mampu mengelola waktu dengan baik akan mampu menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan, menghindari penundaan, dan mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pekerjaan, kepatuhan terhadap tenggat waktu, dan kemampuan untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting tanpa membuang-buang waktu. Penggunaan waktu yang efisien mencerminkan profesionalisme, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kualitas hasil kerja yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan waktu dalam melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai sudah cukup optimal. Hal ini terlihat dari pembagian jadwal patroli yang dilakukan secara rutin dua kali sehari, serta patroli dadakan pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, petugas juga berupaya melaksanakan tugas sesuai instruksi meskipun menghadapi berbagai kendala. Keterlambatan patroli dalam melaksanakan tugas masih terjadi, terutama disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingkat pelanggaran. Meskipun demikian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia agar kegiatan penertiban dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata di lapangan.

4. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran krusial dalam mengelola dan memanfaatkan sumber

dayanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya ini meliputi dana, peralatan, tenaga kerja, dan teknologi.

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen krusial dari sumber daya organisasi, yang berperan dalam mendukung efektivitas kerja. Sarana dan prasarana mencakup peralatan atau perkakas yang digunakan langsung untuk menjalankan tugas, seperti komputer, mesin, dan kendaraan. Sementara itu, infrastruktur mengacu pada fasilitas pendukung utama, seperti gedung, jalan, jaringan listrik, dan sistem teknologi.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah sarana dan prasarana serta menurunnya kondisi beberapa sarana penting, seperti kendaraan truk sering mogok, peralatan komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya, termasuk CCTV dan drone. Kendala-kendala ini cukup signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pembaruan dan penambahan sarana diperlukan agar kegiatan lapangan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan efisien.

b. Ketersediaan dana

Ketersediaan dana merupakan elemen krusial yang mendukung efektivitas organisasi, karena berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan seluruh kegiatan operasional dan pengembangan. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembelian sarana dan prasarana, pembayaran gaji karyawan, pelaksanaan program kerja, hingga investasi dalam teknologi dan pelatihan sumber daya manusia.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran penindakan PKL sudah cukup optimal. Hal ini terlihat dari bahwa telah terealisasinya anggaran dengan baik berdasarkan LAKIP 2024, yaitu 91,46 telah terealisasi. Namun, peningkatan anggaran masih diperlukan untuk fasilitas pendukung, seperti kendaraan seperti truk, peralatan komunikasi, seragam, dan peralatan pemantauan seperti CCTV dan drone dan fasilitas pendukung lainnya, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dapat berjalan lebih maksimal dalam menjaga penertiban.

5. Kemandirian

Kemandirian didefinisikan yaitu pada kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Kemandirian ini mencerminkan tingkat komitmen karyawan terhadap pekerjaannya, yang dibuktikan dengan rasa tanggung jawab, inisiatif, dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

a. Tanggung jawab pelaksanaan tugas

Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas mencerminkan kemampuan dan kemauan seorang karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh kesadaran dan siap mempertanggungjawabkan hasilnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan tugas penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari komitmen personel dalam melakukan penjangkauan dan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai, yang dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, dan lain-lain, untuk menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan atasan. Selain itu, setiap anggota Satpol PP juga diwajibkan melaporkan kegiatan di lapangan, baik secara tertulis maupun lisan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

b. Komitmen pelaksanaan tugas dan fungsinya

Komitmen dalam melaksanakan tugas mencerminkan keseriusan dan dedikasi

karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya, dengan tujuan memberikan hasil terbaik bagi kemajuan organisasi. Komitmen ini berkaitan erat dengan motivasi internal karyawan, yang bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan imbalan, tetapi juga karena rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima di pasar keramat sudah cukup optimal, karena para personil sudah menyadari akan kewajibannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dan mengikuti SOP yang diberikan demi tercapainya tujuan organisasi.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KERAMAT BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Dalam suatu program yang dibentuk dan dijalankan pasti ada faktor yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti faktor pendorong dan faktor penghambat.

Berikut Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah :

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam kinerja adalah elemen yang berkontribusi positif terhadap efektivitas dan efisiensi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari lingkungan, sumber daya, dan dukungan sosial di sekitar individu atau organisasi tersebut. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai faktor pendukung kinerja:

a. Kedisiplinan dan Pengelolaan waktu dengan baik

Kedisiplinan dan pengelolaan waktu dengan baik merupakan elemen krusial yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas, terutama dalam kegiatan penindakan pedagang kaki lima (PKL). Disiplin mencerminkan sejauh mana petugas mematuhi dan bertanggung jawab atas aturan dan tugas yang telah ditetapkan, seperti kehadiran tepat waktu dan keseriusan dalam melaksanakan tugas secara konsisten. Di sisi lain, kemampuan mengelola waktu menunjukkan seberapa efisien petugas memanfaatkan waktu kerjanya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan dan pengelolaan waktu dengan baik merupakan faktor penting yang mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini terlihat dari keberadaan petugas yang selalu tepat waktu saat melaksanakan tugas di lapangan, serta keteraturan dalam melaksanakan patroli sesuai jadwal yang telah ditetapkan, baik untuk patroli rutin harian maupun patroli dadakan berdasarkan laporan dari masyarakat. Misalnya, ketika ada laporan pedagang berjualan di luar area yang telah ditentukan, petugas Satpol PP langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban secara cepat dan terkoordinasi.

b. Tanggung jawab dan Komitmen personel yang kuat

Tanggung jawab dan komitmen personel yang kuat merupakan unsur krusial dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, khususnya dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Tanggung jawab mencerminkan kesadaran setiap anggota Satpol PP terhadap peran dan tugas yang harus dijalankan, yang tercermin dari kesungguhan dan kemandirian dalam bekerja tanpa perlu pengawasan terus-menerus. Sementara itu, komitmen menunjukkan loyalitas dan kesungguhan personel dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan komitmen personel yang kuat merupakan faktor penting yang mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini terlihat dari

kepatuhan mereka terhadap arahan pimpinan, melaksanakan tugas sesuai prosedur, serta bersikap profesional dan persuasif saat menegur pedagang. Selain itu, personel juga bekerja secara terorganisasi, saling mendukung sebagai satu tim, dan menyampaikan laporan secara berkala. Misalnya, saat kegiatan penertiban, mereka melaksanakan tugasnya secara tertib dan sesuai ketentuan, yang mencerminkan rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat dalam menjaga ketertiban pasar.

c. Dukungan anggaran operasional yang memadai

Dukungan anggaran operasional yang kuat merupakan elemen krusial dalam keberhasilan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Anggaran ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan lapangan, seperti transportasi, perlengkapan kerja, seragam, dan logistik petugas. Ketersediaan Dukungan anggaran operasional yang memadai menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa dukungan anggaran operasional yang memadai merupakan faktor krusial dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun anggaran yang tersedia tidak terlalu besar, Anggaran dana telah terealisasi dengan baik, disertai koordinasi antar instansi, memungkinkan kegiatan penertiban berjalan tertib dan terorganisir. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang baik berdasarkan LAKIP 2024 yang digunakan oleh petugas dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun perlu peningkatan agar bisa menjalankan lebih maksimal pada tugas pokok dan fungsinya Satpol PP dalam menjaga penertiban.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam kinerja mengacu pada berbagai elemen atau kondisi yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Berikut beberapa faktor penghambat yang umum ditemui:

a. Keterbatasan kompetensi petugas

Keterbatasan kompetensi mengacu pada situasi di mana petugas tidak memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, atau kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan profesional. Keterbatasan ini dapat mencakup pemahaman peraturan, keterampilan komunikasi, keterampilan lapangan, dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan kompetensi petugas menjadi penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai. Hal ini terlihat dari lemahnya kemampuan komunikasi persuasif, pendekatan humanis, dan pemberian solusi konkret kepada pedagang. Sebagai contoh, pada beberapa kasus penindakan, petugas hanya memberikan teguran tanpa menjelaskan lokasi relokasi yang diizinkan, sehingga mengakibatkan pedagang kembali ke lokasi semula. Selain itu, kurangnya pengalaman dan ketiadaan forum komunikasi antara Satpol PP, pedagang, dan masyarakat juga mengakibatkan proses penindakan kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas petugas, terutama dalam hal komunikasi dua arah dan pendekatan yang lebih solutif, agar penindakan dapat dilakukan secara optimal dan menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.

b. Fasilitas kerja terbatas

Fasilitas kerja yang terbatas dapat dipahami sebagai situasi di mana sarana dan prasarana yang seharusnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi, khususnya di sektor pelayanan publik, masih belum memadai dari segi kuantitas, kualitas, dan kesesuaian. Hal ini mencakup kurangnya transportasi operasional,

peralatan kerja lapangan, perangkat komunikasi, ruang kerja yang memadai, serta dukungan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan fasilitas kerja menjadi penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai. Hal ini terlihat dari jumlah dan kondisi sarana prasarana, seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, dan peralatan lapangan yang kurang memadai. Misalnya, truk operasional sering mengalami kerusakan dan mogok, sementara Drone, CCTV tidak tersedia bagi, sehingga menyulitkan pengawasan dalam operasi penindakan. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektivitas di lapangan, meskipun petugas tetap berupaya melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dengan fasilitas yang kurang optimal, kegiatan penindakan tidak dapat berjalan seefisien yang diharapkan.

c. Kekurangan Personel dan Ketidakseimbangan Beban Kerja

Kekurangan Personel dan ketidakseimbangan beban kerja merupakan suatu keadaan ketika jumlah pegawai dalam suatu organisasi tidak cukup untuk memenuhi tuntutan tugas dan tanggung jawab yang ada, sehingga mengakibatkan pembagian pekerjaan menjadi tidak merata.

Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kekurangan personel dan beban kerja yang tidak seimbang merupakan faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Keramat Barabai. Hal ini terlihat dari terbatasnya jumlah petugas, terutama yang langsung terjun ke lapangan, yang tidak sebanding dengan luas area yang dipantau dan jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang perlu ditertibkan. Selain itu, sebagian besar petugas harus membagi waktu dengan tugas pengawasan lainnya, sehingga penertiban tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Akibatnya pedagang kaki lima sering kembali ke lokasi dilarang saat petugas tidak ada. Beban kerja yang tidak seimbang ini berdampak langsung pada kurang optimalnya efektivitas penertiban di lapangan.

SIMPULAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Keramat Barabai tergolong cukup optimal. Hal ini terlihat dari lima aspek utama: *Pertama*, aspek ketepatan waktu. Disiplin pelaksanaan tugas cukup optimal melalui patroli rutin dan mendadak meskipun kekurangan personel. Penggunaan waktu juga cukup optimal dengan pembagian jadwal patroli, meskipun terdapat keterbatasan. *Kedua*, aspek kemandirian. Personel menunjukkan tanggung jawab dalam sosialisasi, penertiban, dan kerja sama lintas sektor. Komitmen mereka juga cukup optimal, terlihat dari kesadaran akan tugas dan tanggung jawab. *Ketiga*, aspek efektivitas. Dana tersedia cukup optimal dan terealisasi. Namun perlu peningkatan lagi karena pada indikator sarana dan prasarana kurang optimal perlunya peningkatan karena fasilitas operasional masih kurang optimal, terutama truk kendaraan sering mogok, alat komunikasi, dan perlengkapan pendukung lainnya yang masih minim seperti CCTV, Drone, dan lainnya. *Keempat*, aspek kualitas. Kemampuan dan keterampilan personel masih kurang optimal karena kurangnya pelatihan, khususnya dalam hal komunikasi dan negosiasi dengan PKL. *Kelima*, aspek kuantitas. Jumlah personel belum memadai dan tidak sebanding dengan luas wilayah serta tingkat pelanggaran. Unit kerja juga kurang optimal karena beban kerja tidak seimbang, karena kurangnya personel berpengalaman. Adapun Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Keramat Barabai terbagi menjadi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung ialah kedisiplinan dan pengelolaan waktu

yang baik, karena kehadiran petugas yang tepat waktu dan keteraturan dalam patroli mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Kedua, tanggung jawab dan komitmen personel yang kuat, karena pelaksanaan tugas yang profesional, terorganisir, dan sesuai arahan pimpinan menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketertiban. Ketiga, dukungan anggaran operasional yang cukup optimal karena terealisasinya dengan baik berdasarkan LAKIP 2024 Satpol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Faktor penghambatnya ialah Pertama, keterbatasan kompetensi petugas, karena lemahnya pendekatan persuasif dan komunikasi dua arah menyebabkan proses penertiban kurang odan pedagang cenderung kembali berjualan di tempat semula. Kedua, fasilitas kerja yang terbatas, karena kondisi kendaraan operasional yang masih kurang optimal dan minmnya alat komunikasi menghambat koordinasi serta pelaksanaan tugas di lapangan, yang berdampak pada kurang optimalnya penertiban. Ketiga, kekurangan personel dan ketidakseimbangan beban kerja, karena jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah pelanggaran menyebabkan pengawasan tidak konsisten, sehingga PKL kembali berjualan di lokasi yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja*.
- Anonim. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat*.
- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bintoro, & Daryanto, M. (2017). *Manajemen penilaian kinerja karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fazriannor, M. (2020). *Kinerja Polisi Pamong Praja dalam pengendalian pedagang kaki lima di Kabupaten Balangan* (Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai).
- Pasolong, H. (2016). *Metode penelitian administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, R. A. (2020). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serpong dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Serpong*. Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.